



EDISI
REVISI

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Budi Rizki Husin, S.H., M.H



PROFIL PENULIS

Nama : Budi Rizki Husin, S.H. M.H
Tpt/tgl Lahir : Tanjung Karang, 30 September 1977
Alamat : Jalan Cendana Perumahan Pesona Cendana, B9 Tanjung Senang
Kotamadya Bandar Lampung
Email : buddyrizky@yahoo.com
Pangkat/Golongan : Lektor / III D
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pengalaman Jabatan : Ketua BKBH Unila
Senat Fakultas Hukum
Pendidikan : S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung,
S-2 Fakultas Hukum Universitas Lampung

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penulis

Budi Rizki Husin, S.H. M.H.

Desain Cover dan Layout

Pustaka Media Desaign

vii-210 hal, 26 x38

Cetak, Januari 2023

ISBN : 978-979-8510-40-3

Penerbit

Heros fc

Jln. Z.A Pagar Alam Depan Sekolah Darma Bangsa

Kedaton Bandar Lampung

Dilarang Mengutip atau Memperbayak sebagian

Atau seluruh buku ini tanpa izin dari penerbit

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Sistem Hukum	1
I.2. Sistem Peradilan Pidana	9
I.3. Beberapa Definisi Sistem Peradilan Pidana.....	11
I.4. Perlunya Peradilan Pidana	17
I.5. Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana	35
I.5.1. Keterpaduan Sebagai Rangkaian Kegiatan	36
I.5.2. Keterpaduan Sebagai Metode.....	37
I.5.3. Alasan Keterpaduan	47
I.5.4. Upaya Meningkatkan Keterpaduan.....	51
I.5.5. Peranan Sikap Mental Dalam Keterpaduan	52

BAB II MODEL PROSES PERADILAN PIDANA

2.1. Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Sistemik	54
2.2. Penegakan Hukum Pidana Dalam Paradigma Sistem Hukum.....	63
2.3. Integritas dan Profesional Penegak Hukum	65
2.4. Sistem Nilai Proses Peradilan Pidana	70
2.5. <i>Due Process Model</i> dan <i>Crime Control Model</i>	75
2.5.1. <i>Crime Control Model</i>	80
2.5.2. <i>Due Process Model</i>	81
2.5.3. <i>Family Model</i>	83
2.6. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia	85
2.7. Sistem Nilai Berkaitan Dengan Asas-Asas Peradilan Pidana.....	90
2.7.1. Asas Praduga Tak Bersalah.....	90
2.7.2. Asas Memperoleh Bantuan Hukum.....	92

2.7.3. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di Muka Hukum.	94
2.7.4. Asas Oportunitas	94
2.7.5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	98

BAB III TAHAP-TAHAP PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA

3.1. Tahap di Kepolisian	100
3.1.1. Penyelidikan... ..	102
3.1.2. Penyidikan... ..	104
3.1.3. Penangkapan... ..	105
3.1.4. Penahanan... ..	107
3.1.5. Pengeledahan... ..	110
3.1.6. Penyitaan... ..	112
3.1.7. Berakhirnya Tugas Polisi Dalam Penyelidikan.....	113
3.2. Tahap Pemeriksaan di Kejaksaan	115
3.2.1. Prapenuntutan... ..	115
3.2.2. Dakwaan dan Penuntutan	116
3.2.3. Penghentian Penuntutan... ..	117
3.2.4. Pelimpahan Perkara Oleh Kejaksaan Ke Pengadilan	118
3.3. Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim di Pengadilan	119
3.3.1. Praperadilan... ..	119
3.3.2. Macam-macam Pemeriksaan di Persidangan.	122
3.3.2.1. Acara Pemeriksaan Biasa.....	123
3.3.2.2. Acara Pemeriksaan Singkat	124
3.3.2.3. Acara Pemeriksaan Cepat... ..	125
3.3.2.4. Keputusan Pengadilan... ..	126
3.4. Upaya Hukum Untuk Menolak Keputusan Pengadilan	129
3.4.1. Upaya Hukum Biasa.....	129
3.4.2. Pemeriksaan Banding	129
3.4.3. Pemeriksaan Kasasi... ..	131
3.4.4. Upaya Hukum Luar Biasa	133
3.4.5. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	133

3.4.6. Peninjauan Kembali Putusan.....	134
3.5. Pelaksanaan Putusan Hakim	135
3.6. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	138
3.7. Tahap Lembaga Masyarakat.....	140
3.7.1. Fungsi Sosial Lembaga Masyarakat.....	140
3.7.2. Hubungan Lembaga Masyarakat dengan Masyarakat	141
3.8. Penasihat Hukum Dalam Tahap Proses Peradilan Pidana	141
3.9. Hubungan Antar Badan-Badan Peradilan Pidana	143
3.9.1. Hubungan Kepolisian dengan Penuntut Umum dan Pengadilan.....	143
3.9.2. Hubungan Jaksa dengan Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.....	145

BAB IV DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

(Suatu Analisis Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana)

4.1. Diskresi	149
4.2. Penegakan Hukum	152
4.3. Diskresi Penegakan Hukum Pidana dalam Kaitan HAM	155
4.3.1. Penegakan Hukum dan Penegakan HAM Sampai Dimana.....	161
4.3.1.1. Hak Asasi Manusia... ..	164
4.3.1.2. HAM Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana.....	167
4.3.1.3. Pemantauan Terhadap HAM.....	170
4.4. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa	171
4.4.1. Relevansi Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Sistem Peradilan Pidana yang Adil dan Layak.	173
4.4.2. Tujuan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Sebagai Jaminan Pengakuan Terhadap HAM.....	174
4.4.3. Tujuan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Memelihara Solidaritas Masyarakat.....	178
4.4.4. Tujuan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Mewujudkan Peradilan Pidana yang Jujur (<i>Fair Trial</i>)	189

4.4.5. Keuntungan dan Kerugian Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana	194
--	-----

DAFTAR PUSTAKA

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penyusun

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

**SISTEM PERADILAN PIDANADI
INDONESIA**

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.